

**KESETARAAN GENDER**

Oky Oktaviani Pane, Swiamanto Sihombing, Desiyanti Simbolon, Djefrin Zalukhu,  
Roida Lumbantobing  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen,  
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  
paneokyoktaviani@gmail.com,sihombingswiamanto71@gmail.com,  
desiyantisimbolon58@gmail.com, Zalukhudjefrin@gmail.com

Submitted: 17 May 2024

Accepted: 26 May 2024

Published: 27 May 2024

**ABSTRAK**

Kesetaraan gender merupakan isu fundamental dalam diskursus hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun upaya untuk mencapai kesetaraan telah mengalami kemajuan, disparitas gender masih menjadi tantangan global yang menghalangi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini mengeksplorasi konsep kesetaraan gender, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan, serta mengusulkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesetaraan gender merujuk pada konsep di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, realitas sosial-budaya, ekonomi, dan politik seringkali menciptakan hambatan bagi perempuan untuk menikmati hak-hak tersebut secara setara. Faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan gender meliputi stereotip gender, norma sosial yang patriarkal, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta kekerasan berbasis gender. Stereotip gender dapat membatasi pilihan dan peluang bagi perempuan, sementara norma sosial yang mendiskriminatif memperkuat ketidaksetaraan. Akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan layak turut memperlebar kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun psikologis, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesetaraan hak dan peluang, kampanye peningkatan kesadaran untuk menghapus stereotip dan norma diskriminatif, serta investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pencapaian kesetaraan gender tidak hanya membawa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh potensi dan kontribusi perempuan secara setara, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

**Kata Kunci :** kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak asasi manusia

**ABSTRACT**

Gender equality is a fundamental issue in the discourse on human rights and sustainable development. Although efforts to achieve equality have made progress, gender disparities are still a global challenge that hinders the achievement of social justice and societal prosperity. This study explores the concept of gender equality, identifies factors that influence inequality, and proposes strategies to overcome these obstacles. Gender equality refers to the concept where women and men have the same rights, responsibilities and opportunities in various aspects of life, including access to education, employment, asset ownership and participation in decision making. However, socio-cultural, economic and political realities often create obstacles for women to enjoy these rights equally. Factors that influence gender inequality include gender stereotypes, patriarchal social norms, lack of access to education and economic opportunities, and gender-based violence. Gender stereotypes can limit choices and opportunities for women, while discriminatory social norms reinforce inequality. Limited access to education and decent work also widens the economic gap between women and men. Additionally, gender-based violence, whether physical or psychological, is a violation of human rights and creates an unsafe environment for women. To overcome these challenges, a comprehensive strategy is needed that involves various stakeholders, such as the government, civil society organizations, the private sector and society itself. Steps that can be taken include policy and legislative reforms to ensure equal rights and opportunities, awareness-raising campaigns to eliminate stereotypes and discriminatory norms, and investment in women's education and economic empowerment. Achieving gender

equality not only brings justice and respect for human rights, but also contributes to economic growth, poverty alleviation and sustainable development. By involving all women's potential and contributions equally, society can utilize human resources optimally and create a more just and inclusive environment for all.

**Keywords:** gender equality, women's empowerment, human rights

## PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu sentral dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Meskipun telah dicapai kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan gender masih menjadi tantangan yang menghalangi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian potensi manusia secara penuh. Konsep kesetaraan gender merujuk pada keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sejarah panjang diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan telah membentuk norma sosial-budaya yang patriarkal dan menciptakan hambatan struktural bagi kesetaraan gender. Stereotip gender yang mengakar kuat dalam masyarakat seringkali membatasi pilihan dan peluang bagi perempuan, serta memperkuat persepsi bahwa mereka memiliki peran dan kemampuan yang terbatas. Norma sosial yang mendiskriminatif ini turut memengaruhi pola pikir dan perilaku, sehingga memperkuat ketidaksetaraan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam ranah pendidikan, meskipun telah terjadi peningkatan akses bagi perempuan, disparitas masih terlihat dalam tingkat partisipasi dan prestasi akademik. Menurut data UNESCO, pada tahun 2020, sekitar 129 juta anak perempuan di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar. Selain itu, perempuan juga menghadapi hambatan dalam menempuh pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka di pasar kerja. Dalam bidang ekonomi, ketimpangan gender juga terlihat dalam partisipasi angkatan kerja, upah, dan peluang untuk menduduki posisi kepemimpinan. Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara global hanya mencapai 47,4%, jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki yang mencapai 72,2%. Selain itu, perempuan cenderung terkonsentrasi dalam sektor-sektor dengan upah rendah dan kurang terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan.

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi ketimpangan gender yang paling mengkhawatirkan. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya. Kekerasan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, serta menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam ranah kepemimpinan dan pengambilan keputusan, perempuan masih kurang terwakili. Pada level pemerintahan, hanya sekitar 25,5% kursi parlemen di seluruh dunia yang diduduki oleh perempuan pada tahun 2021, menurut data dari Inter-Parliamentary Union. Dalam sektor swasta, perempuan juga menghadapi hambatan dalam menduduki posisi kepemimpinan tingkat atas, dikenal sebagai fenomena "langit-langit kaca" (glass ceiling). Faktor-faktor sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang kompleks ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan lingkaran ketidaksetaraan yang sulit untuk diputus. Namun, upaya untuk mencapai kesetaraan gender tidak hanya merupakan tuntutan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Studi-studi telah menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ketika perempuan memiliki

akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi, mereka dapat berkontribusi secara penuh terhadap produktivitas dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti keamanan pangan, kesehatan, dan pendidikan berkualitas. Melihat tantangan dan dampak yang luas dari ketimpangan gender, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Berbagai inisiatif dan komitmen telah diambil oleh organisasi internasional, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan struktural dan mendorong perubahan sosial-budaya yang diperlukan. Salah satu tonggak penting dalam upaya pencapaian kesetaraan gender adalah Konferensi Dunia tentang Perempuan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1995 di Beijing, Cina. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, yang menjadi kerangka kerja komprehensif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Platform Aksi Beijing menekankan perlunya tindakan dalam 12 bidang kritis, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, kekerasan terhadap perempuan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 juga menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama. Tujuan Kelima SDGs secara khusus bertujuan untuk "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan". Tujuan ini mencakup target-target spesifik seperti menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, menghapuskan praktik-praktik merugikan seperti perkawinan anak, serta menjamin akses yang sama bagi perempuan terhadap kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada level nasional, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pengesahan undang-undang untuk mencegah diskriminasi di tempat kerja, menjamin akses terhadap pendidikan yang setara, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender. Namun, implementasi kebijakan dan peraturan ini seringkali menghadapi tantangan karena masih kuatnya norma sosial-budaya yang diskriminatif. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah norma sosial-budaya dan menghapuskan stereotip gender menjadi sangat penting.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan Studi pustaka dimana pengumpulan data melalui studi pustaka selain menggunakan buku-buku, peneliti juga melakukan internet searching guna mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah, teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, serta pendapat-pendapat yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

## **Pembahasan**

Ketimpangan gender telah berakar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia, menciptakan hambatan sistemik bagi perempuan untuk menikmati hak dan peluang yang setara dengan laki-laki. Untuk memahami tantangan ini secara komprehensif, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab utama, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap individu, keluarga, masyarakat, dan pembangunan secara keseluruhan.

### **1) Stereotip Gender dan Norma Sosial-Budaya**

Salah satu akar penyebab ketimpangan gender adalah stereotip gender yang

mengakar kuat dalam masyarakat. Stereotip ini melekatkan karakteristik tertentu pada perempuan dan laki-laki, serta membagi peran dan tanggung jawab mereka berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, perempuan sering dianggap lebih lemah, emosional, dan lebih cocok untuk peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Sementara itu, laki-laki sering diasosiasikan dengan kekuatan, rasionalitas, dan pencari nafkah utama. Stereotip ini kemudian diteruskan melalui proses sosialisasi dan norma sosial-budaya yang mendiskriminatif. Sejak kecil, anak-anak dibesarkan dengan ekspektasi dan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka. Anak perempuan sering didorong untuk menjadi lebih penurut, lembut, dan fokus pada pekerjaan rumah tangga, sementara anak laki-laki didorong untuk menjadi lebih mandiri, berani, dan berorientasi pada karier.

Norma sosial-budaya ini tidak hanya membatasi pilihan dan peluang bagi perempuan, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, dalam pendidikan, stereotip gender dapat mempengaruhi minat dan prestasi akademik anak perempuan dalam bidang-bidang tertentu, seperti sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM). Dalam dunia kerja, stereotip ini dapat menyebabkan diskriminasi dalam proses rekrutmen, promosi, dan penentuan upah, sehingga menciptakan hambatan bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan atau pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi.

## 2) Akses terhadap Pendidikan dan Peluang Ekonomi

Pendidikan merupakan kunci utama untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan peluang mereka dalam kehidupan. Namun, disparitas gender dalam akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan di banyak negara. Menurut data UNESCO, pada tahun 2020, sekitar 129 juta anak perempuan di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar. Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma sosial-budaya, dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan. Selain itu, perempuan juga menghadapi hambatan dalam menempuh pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka di pasar kerja. Menurut data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), pada tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara global hanya mencapai 47,4%, jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki yang mencapai 72,2%.

Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan layak membatasi kemampuan perempuan untuk memperoleh kemandirian ekonomi dan berkontribusi secara penuh terhadap pembangunan. Hal ini juga memperkuat siklus kemiskinan, di mana perempuan dengan pendidikan dan peluang ekonomi yang terbatas cenderung memiliki anak-anak yang juga menghadapi hambatan serupa.

## 3) Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi ekstrem dari ketimpangan gender dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta eksploitasi ekonomi. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya. Kekerasan berbasis gender tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketakutan akan kekerasan dapat membatasi mobilitas dan kebebasan perempuan, serta mengurangi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya.

Selain itu, kekerasan berbasis gender juga dapat memiliki dampak intergenerasi, di

mana anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan cenderung mengalami trauma dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam siklus kekerasan di kemudian hari.

#### 4) **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Meskipun perempuan mewakili setengah dari populasi dunia, mereka masih kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pada level pemerintahan, hanya sekitar 25,5% kursi parlemen di seluruh dunia yang diduduki oleh perempuan pada tahun 2021, menurut data dari Inter-Parliamentary Union. Dalam sektor swasta, perempuan juga menghadapi hambatan dalam menduduki posisi kepemimpinan tingkat atas, dikenal sebagai fenomena "langit-langit kaca" (glass ceiling). Kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan kebijakan dan program yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan prioritas perempuan. Selain itu, hal ini juga dapat membatasi peluang perempuan untuk mempengaruhi agenda pembangunan dan mempromosikan kesetaraan gender secara lebih efektif.

#### 5) **Dampak Ketimpangan Gender terhadap Pembangunan**

Ketimpangan gender tidak hanya merupakan isu keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi, mereka dapat berkontribusi secara penuh terhadap produktivitas dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Peningkatan pendapatan perempuan juga terkait erat dengan perbaikan kesehatan, gizi, dan pendidikan anak-anak, sehingga menciptakan lingkaran positif bagi pembangunan manusia. Di sisi lain, ketimpangan gender dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Menurut perkiraan Bank Dunia, pembatasan terhadap kesempatan ekonomi bagi perempuan telah menyebabkan kerugian sebesar \$160 triliun dalam pendapatan global. Selain itu, ketidaksetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan dapat menghambat inovasi dan produktivitas, serta menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil dalam sektor-sektor tertentu.

Ketimpangan gender juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang kurang berdaya dan kurang memiliki akses terhadap layanan kesehatan cenderung mengalami masalah kesehatan yang lebih besar, seperti kematian ibu, penyakit menular, dan kesehatan mental yang buruk. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu perempuan itu sendiri, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender memainkan peran penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perempuan, terutama di daerah pedesaan, sering menjadi pengelola sumber daya alam yang utama, seperti air, hutan, dan lahan pertanian. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, perempuan juga cenderung lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Ketimpangan gender dalam akses terhadap sumber daya, informasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat memperbesar kerentanan ini dan menghambat upaya adaptasi dan mitigasi.

#### 6) Strategi untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender

Mengingat kompleksitas tantangan ketimpangan gender dan dampaknya yang luas, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pendekatan ini harus mencakup reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan norma sosial-budaya, serta investasi dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan terhadap perempuan.

Pada level kebijakan, pemerintah berperan penting dalam menjamin kesetaraan hak dan peluang bagi perempuan melalui reformasi undang-undang dan peraturan yang diskriminatif. Hal ini dapat mencakup pengesahan undang-undang anti-diskriminasi di tempat kerja, perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, serta kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, seperti cuti melahirkan dan fasilitas penitipan anak.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, seperti melalui kuota atau target tertentu. Keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi dapat memastikan agar kebijakan dan program lebih responsif terhadap kebutuhan dan prioritas perempuan. Perubahan norma sosial-budaya merupakan kunci utama untuk menghapuskan stereotip gender dan menciptakan lingkungan yang lebih setara. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan, dan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat serta media dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan menghapuskan norma diskriminatif.

#### KESIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan isu fundamental yang tidak hanya menyangkut keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Meskipun telah dicapai kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan gender masih menjadi tantangan global yang menghalangi pencapaian potensi manusia secara penuh. Faktor-faktor seperti stereotip gender, norma sosial-budaya yang diskriminatif, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, kekerasan berbasis gender, serta kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan hambatan utama yang harus diatasi. Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan pembangunan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga masyarakat itu sendiri. Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan norma sosial-budaya, investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pencapaian kesetaraan gender tidak hanya membawa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh potensi dan kontribusi perempuan secara setara, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

#### DAFTAR PUSTAKA

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Krishnan, K. (2022). The Global Findex Database 2021: Building the Trustworthy AI of the Future in Financial Services. World Bank Group.  
Inter-Parliamentary Union. (2021). Women in National Parliaments.

International Labour Organization. (2022). World Employment and Social Outlook Trends 2022.

United Nations. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All.

World Bank. (2019). Profiting from Parity: Unlocking the Potential of Women's Businesses in Africa.

World Health Organization. (2021). Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018.